

SKRIPSI

**”EFEKTIVITAS STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) DIMASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020
PADA DINAS KOPERASI DAN UKM POVINSI NTB ”**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh

LIA FITRIANI

(217120093)

**KONSENTRASI ENTREPRENEUR
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

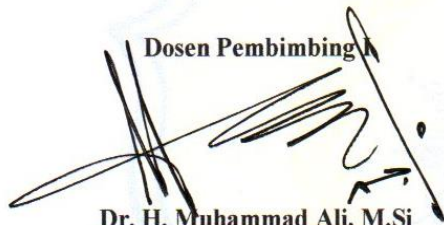
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
EFEKTIFITAS STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) DIMASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020
PADA DINAS KOPERASI DAN UKM POVINSI NTB

Telah Memenuhi Syarat Dan Disetujui

Tanggal: 12 Februari 2021

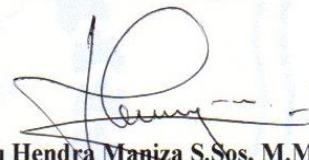
Menyetujui:

Dosen Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN: 080606680

Dosen Pembimbing II



Lalu Hendra Maniza S.Sos, M.M
NIDN: 0828108404

Mengetahui
Ketua Program Studi



Lalu Hendra Maniza, S.Sos, MM
NIDN: 0828108404

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) DIMASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020
PADA DINAS KOPERASI DAN UKM POVINSI NTB

Oleh :

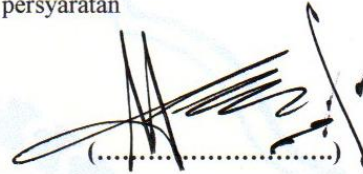
Lia Fitriani

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal: 2 Februari 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim penguj

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

(PU)



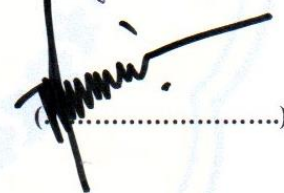
Lalu Hendra Maniza S.Sos, M.M.
NIDN. 0828108404

(PP)



Sulhan Hadi SE, M.M
0813038202

(PN)



Mengetahui Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram :

Nama : Lia Fitriani

Nim : 217120093

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB”** adalah hasil karya saya sendiri. Dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain kecuali sebagai acuan dan dikutip sebagai tata penulis karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur jiplakan, Hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Mataram, 13 Februari 2021
Penulis



Lia Fitriani
217120093



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIA FITRIANI
NIM : 217120093
Tempat/Tgl Lahir : lb. Lombok / 01 / 01 / 1998
Program Studi : Administrasi Bisnis
Fakultas : FISIPol
No. Hp/Email : 082342282091 (WA) / liafitriani@gmail.com
Judul Penelitian :-

"Efektifitas Strategi pemberdayaan UMKM dimasa
Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Pada Dinas Koperasi UMK
Provinsi NTB"

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 62 36 9

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 2 Maret 2021

Penulis



LIA FITRIANI
NIM. 217120093

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIA FITRIANI
NIM : 217120093
Tempat/Tgl Lahir : lb.lombok /01/01/1998
Program Studi : Administrasi Bisnis
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 082342282091 (WA) / liafitriani01gg@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

"Efektivitas Strategi Pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Cooperasi UKM Provinsi NTB"

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 2 Maret 2021

Penulis



LIA FITRIANI
NIM. 217120093

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

RIWAYAT HIDUP



Lia Fitriani, biasa dipanggil Lia Lahir di Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgaraba kabupaten Lombok Timur, NTB pada tanggal 01 Januari 1998. Penulis merupakan buah hati dari pasangan Ayahanda Ismaun dan Ibunda Haeriah, Penulis memulai Pendidikan di MI NW Labuhan Lombok pada tahun 2005 hingga tahun 2011, di tahun yang lalu melanjutkan Pendidikan di MTS NW Labuhan Lombok dan tamat pada tahun 2014, dan selanjutnya pada tahun yang sama juga melanjutkan Pendidikan SMA Negeri 1 Pringgabaya dan tamat pada tahun 2017. Melalui penerimaan mahasiswa jalur Prestasi pada tahun 2017 penulis berhasil lulus seleksi dan terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Selain mengikuti Proses perkuliahan, penulis juga pernah bergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis (HIMABI) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Forum Mahasiswa Patuh Karya (FORMASI) ditahun 2018, Universitas Muhammadiyah Mataram.

MOTTO

Kerjarlah impian dan genggamlah Dunia tanpa Luput dengan Akhirat

(Penulis)

“iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri”

(Buya hamka)

“wahai orang-orang yang beriman jadikan shalat dan sabar sebagai penolongmu.

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Qs.Al-Baqarah :153)

PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW.
2. Kedua Orang tua saya yang tercinta Ayah Ibu saya yang tercinta dan penuh perjuangan. Terimakasih atas doa dan yang tidak ada akhirnya, terimakasih untuk segalanya yang tidak akan pernah tergantikan dengan apapun.
3. Untuk saudara-saudara ku yang selalu memberikan semangat dan dukungan, memberi motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Para Dosen terutama dosen pembimbing dan penguji.
5. Organisasi, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mataram (IMM) dan Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis (HIMABI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Terimakasih kepada Bapak Hariadi SE yang sudah memberikan ilmunya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Rian Arsyat atas support dan dukungan yang tiada henti untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Sahabat-sahabatku Asma Saleh dan Dita Trisna Ningsih yang selalu ada dalam perjalanan skripsi ini.
9. Teman-teman kelas Administrasi Bisnis Angkatan 2017.

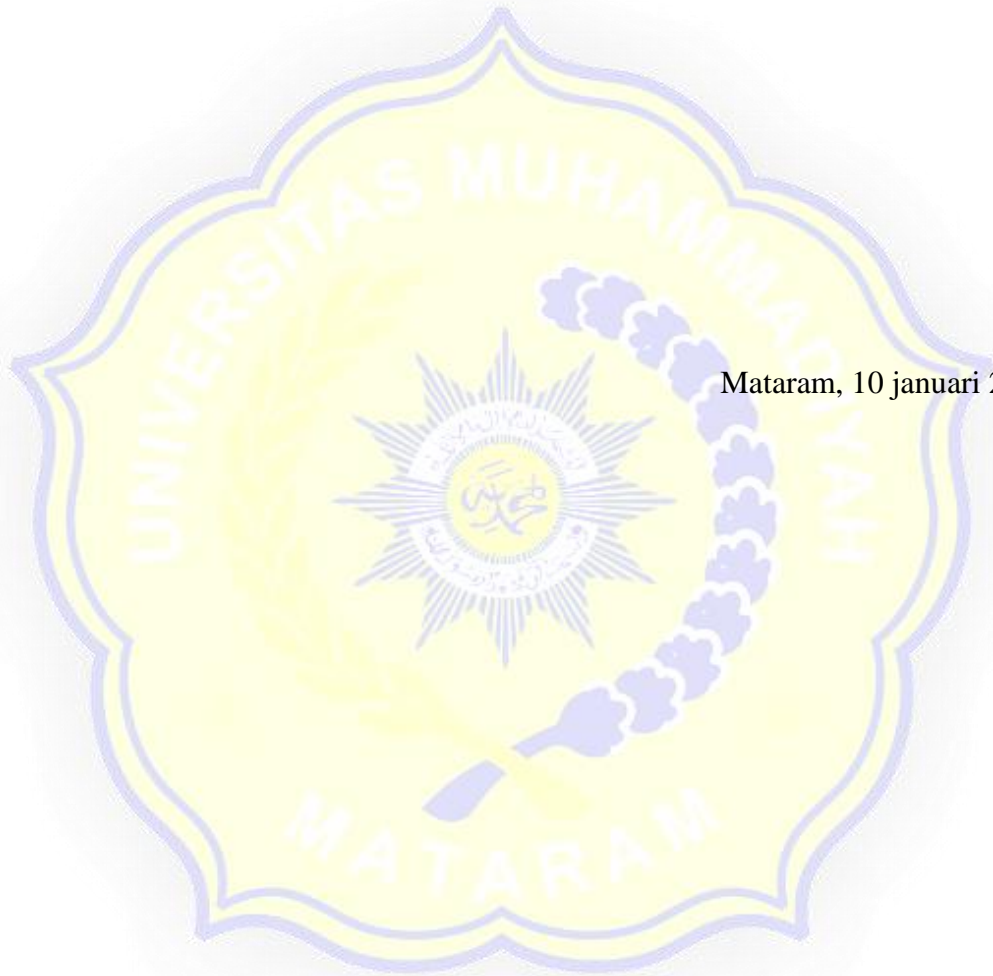
KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal dengan judul **“Efektifitas Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dimasa pandemic Covid-19 pada Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi NTB Dalam”**. Dapat terselesaikan proposal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Bisnis, pada program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dengan lancar dan tepat waktu. Dalam penulisan proposal atau skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan, namun demikian atau bimbingan, bantuan, alasan, serta dukungan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fisipol UMMAT sekaligus Dosen Pembimbing I
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos.,MM selaku Kaprodi Ilmu Administrasi Bisnis Fisipol UMMat sekaligus Dosen Pembimbing ke-II
4. Seluruh Dosen dan Staf Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Fisipol UMMAT yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada kami selama ini
5. Semua pihak yang telah mendukung proposal ini, yang tidak dapat saya

sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan membalas semua amal kebaikan mereka. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan proposal ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan proposal penelitian ini. Akhir kata penulis berharap semoga proposal penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.



Mataram, 10 januari 2021

**EFEKTIVITAS STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DIMASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 PADA
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB**

Oleh :

Lia Fitriani

Nim : 217120093

Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Salah satu upaya pemulihan usaha bagi usaha ultra mikro terhadap dampak wabah Covid 19 yaitu dengan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemberdayaan yang diberikan berupa pentukan program yang melibatkan para usaha Mikro Kecil dalam penyediaan jaring Pengaman Sosial (JPS) dan pemberian Stimulus ekonomi dalam bentuk fasilitasi pemberian modal. Bantuan ini digunakan untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 dengan memberi kesempatan dalam memproduksi hasil usahanya sebagai bentuk partisipan dalam penjegahan Covid-19 yang dapat memberi keuntungan kepada Usaha Mikro Kecil yang terdampak. Serta dapat memberikan kesempatan untuk merintis usaha Kembali dimasa krisis ekonomi. Dalam pelaksanaanya terdapat permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya modal untuk memberdayakan semua Usaha Mikro Kecil yang terdampak Pandemi Covid-19 sehingga tidak semua Usaha Mikro Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diberdayakan.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dimasa Pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tehnik *Purposive Sampling*. Adapun informan penelitan ini terdeiri dari kepala Bidang UKM, Kepala Seksi Pengembangan UKM, Kepala Bidang Program Dinas Koprasi UKM Provinsi NTB dan Pelaku UKM yang di Berdayakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, Observasi dan Documentasi. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, reduksi data , penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk keefektivitasan Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dimasa Pandemic Covid-19 tahun 2020 pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat belum dapat dikatakan baik dari ketiga indikator yang dijelaskan hanya dua indikator yang bisa dikatakan baik, yaitu pada indikator ketepatan sasaran dan sosialisasi program.

Kata Kunci : Efektivitas, Strategi , Pemberdayaan

**THE EFFECTIVENESS OF THE EMPOWERMENT STRATEGY OF
MEDIUM SMALL MICRO ENTERPRISES (MSMEs) during the COVID-19
PANDEMIC, 2020 AT THE DINAS KOPERASI UKM, NTB PROVINCE**

**By:
Lia Fitriani
Nim: 217120093**

**Business Administration Study Program, Faculty of Social and Political
Sciences, Muhammadiyah University of Mataram**

ABSTRACT

One of the attempts to recover micro-enterprises from the effects of the Covid 19 outbreak is the empowerment of micro, small and medium-sized enterprises by the SME Cooperative Office of West Nusa Tenggara Province. The empowerment given is in the form of a program involving Micro and Small Enterprises to provide a Social Security Net (SSP) and provide economic stimuli to encourage resources. This assistance is used to restore the economy of the citizens affected by the Covid-19 Pandemic by providing the opportunity to generate their business results as a means of involvement in preventing Covid-19, which would help the Micro and Small Bu affected. Also, it can provide an opportunity to start a business Back during the economic crisis. Some problems occur in its implementation, namely the lack of capital to empower all Micro and Small Businesses Affected by the Covid-19 Pandemic so that not all Micro and Small Businesses in West Nusa Tenggara Province can be empowered.

This study aimed to describe and analyze the strategy's effectiveness for the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) during the Covid-19 Pandemic in 2020 at the West Nusa Tenggara Province UKM Cooperative Office. The research method used is a descriptive qualitative approach. The informants used in this study used the purposive sampling technique. The research informants consisted of the head of the UKM Division, the Head of the UKM Development Section, the Head of the NTB Province UKM Koprasi Program Division Head, and Empowered UKM Players. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation. Data analysis was performed by collecting data, data reduction, data presentation, and conclusions.

The results of this study showed that the effectiveness of the Strategy for the Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises during the 2020 Covid-19 Pandemic in the West Nusa Tenggara Province of the UKM Cooperative Service could not be said to be good because only two indicators have been defined as good. They are indicators of targeting accuracy and the social program.

Keywords: Effectiveness, Strategy, Empowerment



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
RIWAYA HIDUP PENULIS	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Tinjauan Teori	13
2.2.1. Definisi UMKM	13
2.4.1 Konsep Strategi	21
2.5 Konsep Pemberdayaan	36
2.6 Teori Efektifitas.....	41
<u>2.6.2 Pengukuran Efektivitas</u>	<u>44</u>
2.7 Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM.....	44

2.8	Landasan Hukum.....	47
2.9	Kerangka Berfikir.....	49
BAB III	54
METODE PENELITIAN	51
3.1	Jenis Penelitian.....	51
3.2.1	Jenis Data.....	53
3.3	Lokasi Penelitian.....	55
3.4	Validitas Data.....	56
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
4.1.1	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.....	59
4.3	Hasil dan Pembahasan.....	77
4.3.1	Analisis Kondisi UMKM Pasca Pandemi Covid-19.....	77
4.3.3	Startegi Pemberdayaan UMKM dimasa Pandemi oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.....	81
4.4	Efektivitas Strategi Pemberdayaan UKM dimasa Pandemi Covid-19.....	89
BAB V
PENUTUP	96
5.1	Kesimpulan.....	96
5.2	Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Dan Skala Usaha Mikro Kecil Menengah Per Kab/Kota Se Ntb 2019	6
Tabel 1.2 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Yang Terdampak Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020	10
Tabel 2.1 Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang	74
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Ukm Provinsi Ntb Berdasarkan Sumber Daya Manusia Tahun 2020	74
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Ukm Provinsi Ntb Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2020	74
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Ukm Ntb Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	75
Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Ukm Ntb Berdasarkan Golongan Tahun 2020	75
Tabel 4.5 Penerima Bantuan Stimulus Ekonomi Untuk Bantuan Modal Usaha Bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro Dampak Covid 19 Provinsi Nusa Tenggara Barat	86

TABEL GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	50
Gambar 3.1 Teknik Triangulasi Data.....	56
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi	67
Gambar 4.2 Program Penyediaan Jaring Pengaman Sosial	85
Gambar 4.3 Penyerahan Stimulus Bantuan Kepada Ukm Oleh Diskop Ukm Ntb	88
Gambar 4.4 Sosialisasi Kegiatan Program Jps Gemilang Dan Stimulus Ekonomi	90



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa penyebaran penyakit berbentuk virus diseluruh dunia. Yang disebabkan oleh Korona Virus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan Tiongkok pada tahun 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Virus ini terus menyebar di seluruh dunia dengan hampir 35 juta kasus terkonfirmasi di 188 Negara dan lebih dari 1 juta kasus kematian (Ratcliffe, Rebecca, 2010)

Oleh karena itu, kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia ditemukan pada tahun 2020, ketika seorang warga negara Jepang menginfeksi seorang warga negara Indonesia. Hingga 9 April, pandemi Covid-19 telah menyebar ke 35 provinsi, di antaranya Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah merupakan provinsi yang terjangkit virus corona di Indonesia. (Tom Allard; Domba, Kate 2020)

Pemerintah sendiri telah menyusun dampak dari Covid-19 terhadap ekonomi serta penurunan penghasilan masyarakat pada setiap Provinsi berdasarkan skenario ringan, sedang, hingga buruk, skenario mengacu pada daya tahan ekonomi setiap provinsi maupun penurunan pendapatan pada pelaku ekonomi, dalam skenario sedang pengaruh ekonomi berdampak 25% pendapatan buruh menurun di Nusa Tenggara Barat (Selanjutnya NTB) dan mampu bertahan pada akhir 2020.

Pandemi Covid-19 semakin mengancam perekonomian Indonesia (termasuk Provinsi NTB), dan dampaknya terlihat jelas dari wabah yang meletus pada awal Februari 2020. Toko, ritel, jasa perjalanan, usaha mikro, kecil dan menengah (selanjutnya disebut UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) NTB tutup. Hal ini mengakibatkan sejumlah besar relawan dan karyawan dipulangkan. Oleh karena itu, Pemprov telah bekerja keras memobilisasi usaha kecil dan menengah untuk memperlambat perlambatan ekonomi. Sementara itu, menurut data penulis Dinas Perindustrian NTB, sebanyak 5.000 UMKM dan IKM terdampak akibat wabah Covid-19 di NTB. Data tersebut masih menjalani verifikasi bersama dengan Dinas Sosial NTB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat NTB, Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Warga, dan pemerintah desa.

Pandemi Covi-19 berdampak signifikan pada sektor UMKM / IKM, mulai dari penurunan omzet, arus kas yang terputus, dan kredit macet, hingga peningkatan PHK pekerja. Dibandingkan dengan biasanya, beberapa pedagang yang merasakan dampak korona adalah pedagang di pinggir jalan. Salah satunya pelapak di Kota Mataram, Provinsi NTB yang penghasilannya jauh dibandingkan gempa Lombok sebelum 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan dampak Covid-19 cukup dalam hingga mencapai negatif 5,32. % jauh dari krisis terakhir tahun 1998 dan 2008. Data terakhir menunjukkan bahwa 98% usaha di sektor mikro atau sekitar 68 juta orang terkena dampaknya. Dampak pandemi Covid-19 adalah akibat perlambatan ekonomi. dan Pembatasan sosial telah menyebabkan penurunan permintaan publik.

UMKM merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian dan pembangunan nasional. Mengingat sektor UMKM merupakan motor penggerak

perekonomian dan pembangunan nasional, maka diperlukan suatu strategi peningkatan kapasitas sektor UMKM. Hal ini bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan serta peningkatan kesempatan kerja.

Di bawah pengaruh globalisasi yang melanda dunia menuntut kondisi perekonomian suatu negara harus efektif, efisien dan berdaya saing. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (jumlah penduduk 237.642.326). . Dengan angka tersebut, diharapkan dapat keseimbangan antara berbagai sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Selama pandemi Covid-19, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah merumuskan berbagai strategi untuk mendorong UMKM dan koperasi menjaga kapasitasnya. Bertahan dan bangkit dalam pandemi Covid-19. Di mana Kementerian pertama kali menerapkan berbagai kebijakan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan reorganisasi untuk memberikan kredit kepada peserta UMKM, sehingga membantu koperasi dan UMKM untuk bertahan dan bangkit dalam pandemi Covid-19, dengan tujuan untuk memberikan kredibilitas kepada mereka. Ditunda hingga 6 bulan ke depan, kedua, akan dibuka sistem permodalan ringan baru bagi peserta UMKM dan koperasi.

UMKM tentu saja, tanpa terkecuali, mengalami dampak dari kemunculan Pandemi. Beberapa laporan awal mengindikasikan bahwa UMKM menjadi kelompok usaha yang terdampak sebab mereka memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap barang input Eksternal. Banyak UMKM telah mengalami penurunan permintaan dalam jumlah besar dan mendadak sehingga mengurangi omzet penjualan. Pada waktu bersamaan, kelompok UMKM dapat mengalami kehilangan pasokan tenaga

kerja yang disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB).

Berbagai masalah yang dihadapi UMKM di Indonesia sebagai akibat dari pandemi Covid-19 memerlukan perhatian khusus. Sekitar 98,68% dari 64 juta UMKM di Indonesia merupakan jenis Usaha Mikro yang dikerjakan secara mandiri dan rentan terhadap gangguan Internal dan Esternal. Meskipun UMKM memiliki peran penting, akan tetapi belum diketahui sejauh mana Covid-19 berdampak kepada kelompok usaha ini.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri menyiapkan berbagai program pemenuhan dan pemulihan kebutuhan sosial ekonomi telah diluncurkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat yang sejalan dengan nafas industrialisasi sebagai program unggulan Nusa Tenggara Barat Gemilang, Dimana salah satunya melalui program Jaring Pengaman Sosial(JPS) Gemilang yang bertujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat miskin se-NTB selama 3 bulan kedepan. JPS Gemilang ini menyiapkan 105.000 paket yang berisi; Senbako, Produk Perikanan, Obat, Vitamin dan alat pelindung diri (Masker) Yang semuanya diambil dari produk Lokal hasil dari UMKM. Dengan adanya langkah ini dapat memberdayakan UMKM yang terdampak Pandemi Virus Covid-19.

Pemerintah Daerah di NTB terus memberdayakan dan memperkuat peran UKM serta pengusaha lokal. Baik untuk memproduksi Masker, APD hingga kebutuhan pangan lainnya, Hal tersebut untuk terus memberdayakan UKM/IKM di NTB sehingga Roda perekonomian dapat terus berputar, selain itu pemerintah NTB juga memperlakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di masing-masing Desa disetiap kabupaten dimulai dari Desa Kuripan Utara Kabupaten Lombok Barat,

pemerintah Provinsi NTB meresmikan *Tradedan Distribution Centre* (selanjutnya TDC) yang menjadi milik BUMDES, dengan adanya TDC bertujuan untuk menyalurkan hasil produk-produk UMKM masyarakat NTB yang dibutuhkan waga dan Warung-warung kecil sekaian menjadi Outlet dan penyalur Produk UMKM di NTB.

Selain itu, belum ada Strategi yang jelas untuk meringankan dampak serta mempercepat pemulihan Pasca Pandemi. Dengan demikian UMKM membutuhkan bantuan dan perlindungan bagi bisnis dan pekerja mereka agar dapat bertahan dari tantangan ini. Dengan pemerintah melalui Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB serta berkontribusidalam pemulihan ekonomi”dimasa pandemi Covid-19 tahun 2020 di Nusa Tenggara Barat khususnya pada pemberdayaan UMKM.

Upaya tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat NTB. Selama pandemi Covid-19, strategi ini digunakan untuk menciptakan dan mengembangkan sumber daya guna mencapai kemakmuran. Oleh karena itu, penerapan strategi ini diharapkan dapat menentukan efektif atau tidaknya hasil yang ingin dicapai. Adapun yang dimaksud disini ialah Strategi Pemberdayaan yang memfokuskan pada Perencanaan Strategi UMKM yang lebih berorientasi pada pemberdayaan secara Makro. Melihat Kondisi keterpurukan ekonomi dimasa Pandemi Covid-19 tentunya peran Stakeholder dalam mengimplementasikan Strategi Pemberdayaaan tersebut sangat diharapkan. Dengan demikian Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB mengeluarkan beberapa kebijakannya dalam memberdayakan UMKM pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 diantaranya menerapkan kebijakan seperti ;

1. Membentuk Program Pengadaan Barang dan Jasa untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang.

2. Membentuk Stimulus ekonomi dalam bentuk Fasilitasi pemberian Modal bagi Koperasi dan UKM.

Berdasarkan hal tersebut mengenai yang akan dikaji oleh penulis Tentang efektivitas strategi pemberdayaan UMKM dimasa pandemi Covid-19 tahun 2020 pada DISKOP UKM Provinsi NTB. Data berikut menggambarkan jumlah penyebaran UMKM Per Kabupaten/Kota Se-NTB selama masa Pandemi covid-19

Tabel 1.1
JUMLAH DAN SKALA USAHA
USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH
PER KAB/ KOTA SE - NTB 2019

NO	KAB/KOTA	KLASIFIKASI USAHA			JUMLAH
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	
1	Mataram	15,746	6,194	533	22,473
2	Lombok Barat	3,612	366	0	3,978
3	Lombok Utara	145	71	95	311
4	Lombok Tengah	309	11	3	323
5	Lombok Timur	4,261	34	2	4,297
6	Sumbawa Barat	5,716	303	23	6,042
7	Sumbawa	959	46	4	1,009
8	Dompu	1,323	112	1	1,436
9	Kab Bima	307	7	3	317
10	Kota Bima	6,621	1,152	132	7,905
Jumlah		38,999	8,296	796	48,091

Sumber : <http://diskop.ntbprov.go.id> (2020)

Berdasarkan data diatas tercatat, jumlah usaha mikro ialah 38,999 unit, sedangkan usaha kecil sejumlah 8,296 unit, selain itu usaha menengah berjumlah 796 unit, sehingga total keseluruhan sebanyak 48,091 unit UMKM di Provinsi NTB. Sedangkan diketahui pada tahun 2018 Jumlah UMKM yang ada di Provinsi NTB sebanyak 648.987 unit. Dari data ini menunjukkan bahwa adanya penurunan jumlah

UMKM di Provinsi NTB Menurun. Hal ini di sebabkan oleh Covid-19 yang melanda Negeri, terhusus di NTB.

TABEL 1.2

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG TERDAMPAK COVID-19 PROVINSI NUSA TENGGRA BARAT

TAHUN 2020

No	Kab/Kota	Klasifikasi Usaha			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Kota Mataram	15.746.746	66.1944	5333	22.4732.473
2	Lombok Barat	3.612	366	0	3.978
3	Lombok Utara	145	71	95	311
4	Lombok Tengah	309	11	3	323
5	Lombok Timur	4.261	34	2	4.297
6	Sumbawa Barat	5.716	303	23	6.042
7	Sumbawa	959	46	4	1.009
8	Dompu	1.323	112	1	1.436
9	Kab Bima	307	7	3	317
10	Kota Bima	6.621	1.152	132	7.905
Jumlah		38.999	8.296	796	48.091

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB

Dari data tersebut menunjukkan pesebaran dampak Pandemi Covid-19 terhadap sector UMKM yang ada di seluruh kabupaten /kota Provinsi NTB dimana klasifikasi Usaha dapat dilihat mulai dari dampak pada Sektor Mikro berjumlah 38.999 usaha, usaha Kecil berjumlah 8.296 usaha dan Sektor Menengah berjumlah 796 usaha yang terkena dampak dengan adanya Pandemi Covid-19 ini sehingga total dari keseluruhan UMKM yang terdampak berjumlah 48.091 unit usaha.

Adapun mengenai pemberdayann yang di lakukan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB pada masa Pandemi Covid-19 berdasarkan data terbaru 2020, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB melakukan pemberdayaan dibeberapa UMKM. Tercatat beberapa jumlah yang di berdayakan dalam Programnya di NTB oleh DISKOP

UKM NTB adapun program kegiatan yang dilakukan pada UKM yang terkait yaitu Program Kegiatan Pemberian Stimulus modal Usaha dan program dilibatkan dalam pengadaan Jaringan Pengaman Sosial NTB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan oleh penulis maka Rumusan Permasalahannya ialah Bagaimanakah Efektivitas Strategi Pemberdayaan Usaha UMKM dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini ialah merumuskan keinginan yang akan dicapai oleh Individu, Kelompok, dipahami, diikuti dan dimengerti, oleh pembaca. Tujuan penelitian mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya dan mengarah pada objek yang akan diteliti. Sehingga tujuan yang akan dicapai oleh peneliti adalah menganalisis Efektivitas Strategi Pemberdayaan UMKM dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

a) Manfaat Akademis

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi dunia pendidikan dan menciptakan hasil penelitian tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

b) Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan masukan dan bantuan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dengan Strategi Pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM di Provinsi NTB.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemberdayaan sektor UMKM Provinsi NTB.
3. Dapat menjadi Inspirasi kepada calon peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang UMKM, Serta dapat dikembangkan di bidang lainnya.
4. Bagi penelitian, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan berkaitan dengan proses pemberdayaan UMKM di Provinsi NTB

b) Bagi Fakultas

Hasil penelitian diharapkan sebagai referensi pada peneliti-peneliti yang akan melakukan di masa yang akan datang.

c). Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan berkaitan dengan proses pemberdayaan UMKM di Provinsi NTB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian dahulu salah satu menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian serta menemukan variable-variabel baru mengenai topik Efektifitas Pemberdayaan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM. Selain itu penelitian terdahulu juga menjadi acuan sebagai perbandingan teori sehingga dapat dengan mudah untuk dapat menegaskan posisi penelitian.

Dalam meningkatkan perekonomian suatu negara salah satunya yakni dengan mengembangkan sektor UKM yang ada di Indonesia. Sebagaimana instansi yang berperan penting Dinas Koperasi dan UKM mampu mendukung keberhasilan mengimplementasikan strategi dalam Pemberdayaan UKM, dalam berbagai strategi manajemen dan Perencanaan dalam usaha serta pelatihan memperkenalkan teknologi yang semakin canggih saat ini dan pelatihan-pelatihan lainnya juga sosialisasi. Beberapa penelitian diantaranya dapat dieksplorasi sebagai berikut :

Pertama, Ismail Sumampow, J .E. Kaawoan, Fernando S. Solang (2019) melakukan penelitian tentang Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat Di Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan bahwa Program pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka pengembangan UKM berjalan dengan baik dimana terlihat adanya beberapa program seperti Gebyar UKM Indonesia tahun 2018 di Minahasa Selatan, program peminjaman modal usaha dan program pelatihan dan pembimbingan usaha yang bekerjasama dengan kementerian Koperasi dan UKM.

Kedua, Suardi (2019) melakukan kajian tentang Strategi pengembangan dan pemberdayaan UKM Tanjungbalai telah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi UMKM di Yogyakarta, antara lain: (1) pemasaran; (2) permodalan dan permodalan; (3) inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. (4) Penggunaan bahan baku; (5) Peralatan produksi; (6) Penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan; (7) Rencana pengembangan bisnis; (8) Mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, strategi utamanya adalah strategi pertumbuhan (growth), dimana UMKM di Kota Tanjung Barai memanfaatkan secara maksimal semua keunggulan UMKM yaitu menjaga kualitas bahan baku, legalitas termasuk dalam kualifikasi / ijin produk, dan memelihara Persaingan Harga tenaga listrik dan peningkatan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah di Kota Tanjung Bal Lai dapat mengatasi permasalahan yang muncul dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Tanjung J Lai dengan menggunakan strategi yang bertumpu pada pengambilan Memanfaatkan peluang yang ada Sementara mengadopsi strategi ini dengan memanfaatkan kelemahan yang ada, strategi WT berfokus pada kondisi ekonomi secara umum sebagai dasar untuk rencana masa depan pengembangan bisnis UMKM.

Ketiga, (Muhammad farid'Said, 2015) melakukan kajian Di kantor KOPERINDAG Kabupaten Malos tentang isu penguatan strategi usaha kecil dan menengah (studi kasus di bidang perdagangan). Pada saat yang sama, tahapan partisipasi menunjukkan derajat partisipasi masyarakat dalam rencana atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Koperindag Kab. Marros sangat tinggi. Peserta UMKM menunjukkan minat dan partisipasi yang besar dalam setiap acara pelatihan /

sosialisasi yang diadakan, yang menandai poin ini. Pada saat yang sama, fase pembebasan menunjukkan bahwa pada fase ini perkembangan UMKM di Kabupaten Maros semakin berkembang, dengan aset, jumlah dan hasil usaha yang banyak.

TABEL 2.1
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN

PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN SEKARANG			
No	Judul Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1	Strategi Dinas koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UKM Masyarakat kabupaten minahasa Selatan (Ismail Sumampow , J .E. Kaawoan, Fernando S. Solang,) 2019	Membahas tentang Perkembangan UKM, Lokasi penelitian di kabupaten Minahasa Selatan sedangkan penelitian sekarang membahas tentang Efektifitas Strategi pemberdayaan UKM dan Lokasi penelitian di Provinsi NTB.	Membahas tentang strategi dalam pemberdayaan UKM Sama-sama meneliti tentang Strategi pada Dinas Koperasi dan UKM, Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.
2	Strategi pengembangan serta pemberdayaan UMKM dikita Tanjung Balai (Suardi, 2019)	Variabel yang digunakan ada 2 yaitu Pengembangan dan Pemberdayaan serta objek yang berbeda, menggunakan metode studi kepustakaan, kuesioner yang disebar sebanyak 100 responden dan lokasi penelitian .	Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling
3	Strategi Pembersayaan UMKM pada Dinas KOPERINDAG KABUPATEN Maros (Studi Kasus Pada Sektor Perdagangan) (Muhammad Farid Said,2015)	menggunakan Analisis SWOT dan Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi sedangkan penelitian sekarang menggunakan tehnik pencatatan dokumentasi,wawancara dan Observasi	Membahas tentang strategi dalam pemberdayaan UKM Sama-sama meneliti tentang Strategi pada Dinas Koperasi dan UKM

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. Definisi UMKM

Definisi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia sendiri memiliki beberapa versi. menurut Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008, Klasifikasi UKM Didasarkan atas kekayaan dan hasil penjualan selama satu tahun. Kriteria Usaha kecil sebagai berikut :

- a. Sebuah usaha kecil memiliki kekayaan bersih melebihi Rp. 50.000.000,00 (50 juta rupiah), perusahaan dengan nilai tertinggi Rp. 500.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan komersial;
- b. Penjualan tahunan melebihi 300 juta rupiah (300 juta rupiah), hingga 2,5 miliar rupiah (2 miliar dan 5 juta rupiah).
- c. Aktiva bersih perusahaan menengah melebihi 500.000.000,00 rupee India (500 juta rupiah), dan maksimum 10.000.000.000,00 rupee India (crores), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- d. Penjualan tahunan melebihi 2.5 milyar rupiah (2.5 milyar rupiah), dan tertinggi bisa mencapai 50 milyar rupiah (50 milyar rupiah).

Definisi UKM yang lain dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kedua Lembaga ini menggunakan tenaga kerja sebagai dasar klasifikasi. Usaha Kecil adalah Usaha yang memiliki tenaga kerja 5 hingga 19 Orang. Sedangkan uaha menengah adalah usaha yang memperkerjakan 20 sampai 99 orang. Hal tersebut terjadi mengingat klasifikasi UKM yang didasarkan pada jumlah tenaga kerja lebih mudah dihitung daripada

kekayaan maupun hasil penjualan, maka klasifikasi ini lebih banyak digunakan. (Suharko dan Agustinus Subarsono, 2015 : 4).

Menurut Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998, usaha mikro, kecil dan menengah didefinisikan sebagai: kegiatan ekonomi kecil personel di bidang usaha, terutama kegiatan usaha kecil, yang perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat (Darsin dan Tutik Khotimah). : 2016)

2.2.2. Peran dan Kontribusi UMKM Dalam Perekonomian

Dari status UKM di dunia usaha saat ini, kita bisa melihat perannya dalam perekonomian Indonesia. Urata membagi UMKM menjadi peserta utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja terbesar, peserta penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta pencipta pasar baru dan inovasi (Dharma T. Ediraras: 2018).

Di Indonesia UKM, memiliki peran yang sangat penting masyarakat menyadari daya tahan UKM terhadap krisis ekonomi tahun 1998 misalnya. Hal ini terjadi karena sifat UKM yang sangat fleksibel dibandingkan dengan perusahaan besar. (Berry Tambunan :2009) menyebut UKM mampu menghadapi turbolensi ekonomi makro maupun perubahan kondisi ekonomi dengan baik. Lebih jauh, studi yang dilakukan (Urata:2000) Menjelaskan peran-peran penting UKM di Indonesia. Beberapa perannya yaitu :

1. Penyedia kesempatan kerja
2. Berperan penting dalam pembangunan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat
3. Menciptakan dan berinovasi pasar melalui fleksibilitas dan kepekaan dan hubungan dinamis antara aktivitas perusahaan.

4. Meningkatkan ekspor nonmigas.

Berbagai peran UKM tersebut tentu saja tidak terpisah satu sama lain lainnya, akan tetap saling terkait, sebagai contohnya, peran UKM dalam penyerapan tenaga kerja tentu saja tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi lokal. Begitu juga UKM yang mampu melakukan ekspor, tentu saja pelaku UKM tersebut akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal secara tidak langsung (Dyah Ratih Sulistyastuti Dkk: 2015)

2.2.3. Permasalahan yang dihadapi UKM

Permasalahan yang dihadapi oleh UKM antara lain meliputi:

a) Faktor Internal:

1. Kekurangan dana merupakan faktor utama yang dibutuhkan untuk mengembangkan dunia usaha. Usaha kecil dan menengah kekurangan dana, karena secara umum usaha kecil dan menengah adalah perusahaan swasta atau perusahaan tertutup.
2. Sumber daya manusia terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia usaha kecil baik pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan sangat mempengaruhi pengelolaan usahanya sehingga sulit untuk mengoptimalkan pengembangan usaha.
3. Jaringan bisnis yang lemah dan kemampuan penetrasi bisnis kecil. Jaringan komersial sangat terbatas dan daya penetrasi sangat rendah, sehingga jumlah produk yang dihasilkan sangat terbatas dan kualitas persaingan rendah.

b) Faktor Eksternal:

1. Lingkungan usaha belum sepenuhnya kondusif bagi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan UKM. Hal itu terlihat dari persaingan yang tidak sehat antara pengusaha kecil dan pengusaha besar.
2. Fasilitas dan infrastruktur komersial terbatas. Minimnya informasi terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan mereka harus berkembang pesat, dan infrastruktur yang tidak mendukung perkembangan usaha.
3. Akses pasar terbatas. Akses pasar akan menyebabkan produk akhir tidak dapat dijual secara kompetitif di pasar domestik dan internasional.
4. Akses informasi dibatasi. Selain mendapatkan dana, usaha kecil, menengah, dan mikro juga mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi. Minimnya informasi pada UMKM sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas produk atau layanan dari bagian bisnis UMKM dan produk lainnya. Akibatnya produk dan jasa tidak dapat digunakan karena UMKM tidak dapat memasuki pasar ekspor. Namun di sisi lain, beberapa produk atau jasa juga dapat bersaing di pasar internasional, karena tidak memiliki jalan atau saluran untuk masuk ke pasar dan hanya dapat beredar di pasar domestik.

2.2.4. Solusi dalam mengatasi Permasalahan UKM

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi UMKM dan langkah-langkah yang telah dilakukan selama ini, maka langkah-langkah yang harus diambil adalah:

1. Ciptakan Suasana Bisnis Yang Menyenangkan. Pemerintah perlu bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, termasuk mengupayakan perdamaian dan keamanan komersial, dan menyederhanakan izin usaha, keringanan pajak, dan prosedur lainnya.
2. Bantuan Keuangan. Pemerintah perlu melakukan ekspansi melalui skema kredit khusus yang tidak membebani usaha formal kecil, menengah dan mikro untuk menambah modalnya melalui sektor jasa keuangan formal, sektor jasa keuangan informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura.
3. Perlindungan Komersial. Jenis usaha tertentu, terutama yang secara tradisional lemah secara ekonomi, harus mendapatkan keuntungan bersama (win-win solution) melalui undang-undang atau peraturan pemerintah agar dapat dilindungi oleh pemerintah.
4. Pengembangan Kemitraan. Penting untuk membangun kemitraan untuk membantu satu sama lain antara usaha kecil dan menengah, atau antara usaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar dalam dan luar negeri, untuk menghindari monopoli komersial. Selain itu, juga bertujuan untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efektif.
5. Pelatihan. Pemerintah perlu memperkuat pembinaan UKM dalam hal pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, manajemen, administrasi dan pengembangan usaha. Selain itu, harus ada peluang untuk menerapkan hasil pelatihan lapangan ke praktik teoritis melalui pengembangan kemitraan percontohan.
6. Mendirikan Badan Khusus. Perlu dibentuk organisasi yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan

dengan pengembangan UMKM dan juga harus mencari solusi untuk mengatasi masalah internal dan eksternal yang dihadapi UMKM.

7. Pembangunan Sarana Dan Prasarana. Perlu adanya alokasi lokasi usaha kepada UMKM di lokasi-lokasi yang strategis sehingga dapat meningkatkan potensi pengembangan UMKM tersebut..

2.2.5. Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM

Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Republik Indonesia, pengembangan UMKM merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan pengembangan usaha mikro, kecil dan kecil. usaha menengah dengan memberikan pembinaan dan penguatan sarana Kemampuan menumbuhkan dan meningkatkan kapabilitasnya, daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.

Jika memperhatikan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, peluang untuk berusaha pada dasarnya masih sangat terbuka, terutama untuk usaha kecil dan menengah. Kelompok usaha ini merupakan unit usaha yang paling memungkinkan untuk di tekuni oleh masyarakat khususnya di pedesaan. Berbagai keunggulan strategisnya antanaya adalah cukup mudah untuk dilakukan, peluangnya yang masih terbuka, tidak memerlukan modal besar untuk memulainya.

Namun semua itu akan dapat di laksanakan dengan baik dan sesuai harapan kalau situasi dan lingkungan untuk berusaha mendukung. Keadaan demikian tidak lain sebagai akibat adanya berbagai kendala dan keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada masyarakat umumnya, baik dari segi kemampuan sumber daya manusia

, permodalan, manajemen, fasilitas dan kepemilikan dan kepemilikan asset dan lain-lainnya.

Untuk itu dalam rangka mengeliminir berbagai kendala tersebut dan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UKM), perlu usaha yang simultan dan kompherensif dari pemerintah yang antara lain dapat dilakukan dengan cara (Basri,2002) ;

- a) Memusatkan investasi di bidang pengembangan sumber daya manusia.
- b) Reformasi struktur ekonomi monopoli dan anti persaingan secara menyeluruh untuk menciptakan lapangan bermain yang setara bagi usaha kecil.
- c) Meningkatkan peluang bagi kelompok usaha kecil untuk memperoleh berbagai sumber daya ekonomi khususnya permodalan tanah dan informasi dan teknologi.
- d) Mengubah mekanisme insentif bagi birokrasi lokal dengan memberikan layanan perizinan gratis.
- e) Menghapuskan berbagai pajak atas usaha kecil.
- f) Mendorong lembaga perbankan untuk menggunakan model perencanaan pembiayaan untuk kegiatan komersial.
- g) Mendorong kemungkinan mendirikan lembaga penjaminan kredit untuk pinjaman bank bagi usaha kecil.

2.2.6. Definisi Pemberdayaan UMKM

Menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Republik Indonesia, pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan hasil upaya bersama pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk mencapai sinergi

dalam Bentuk iklim mikro dan pengembangan usaha Usaha Kecil (UMKM) sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang sulit dan mandiri.

Memberdayakan UMKM dalam menghadapi globalisasi dan persaingan yang ketat berarti UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti peningkatan inovasi produk dan layanan, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan cakupan pemasaran. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai jual UMKM itu sendiri, terlebih mengingat UMKM merupakan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, serta mampu bersaing dengan produk luar negeri yang semakin membanjiri sentra industri dan manufaktur Indonesia. (Sudaryanto, 2011).

2.2.7. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

a) Prinsip Pemberdayaan UMKM

Menurut Undang-Undang Undanga Republik Indonesia Pasal 20, Pasal 8 Tahun 2008, prinsip-prinsip yang memberdayakan UMKM meliputi:

1. Mengembangkan kemandirian, kekompakan dan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berinisiatif bekerja.
2. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan adil.
3. Sesuai dengan potensi wilayah dan positioning pasar, sesuai dengan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha.
4. Keseluruhan perencanaan, implementasi dan pengendalian.

b) Tujuan Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Republik Indonesia, prinsip-prinsip yang memberdayakan UMKM meliputi:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, maju dan berkeadilan.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan usaha kecil dan menengah untuk menjadikan mereka perusahaan yang kuat dan mandiri.
3. Meningkatkan peran usaha mikro dan kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, mendistribusikan pendapatan secara adil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

2.3 KONSEP STRATEGI

2.3.1 Definisi Strategi

Strategi sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan harus mampu menghadapi segala permasalahan atau hambatan dari dalam maupun luar perusahaan.

Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan, dalam proses perkembangannya konsep strategi harus terus dikembangkan, setiap orang memiliki pandangan atau definisi strategi yang berbeda. Strategi di bidang bisnis atau bisnis perlu untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan, serta tujuan untuk mewujudkan tujuan jangka pendek atau jangka panjang.

Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengendalian, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan

oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Tjiptono dalam Andi (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah – daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), Strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan Perusahaan dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan.

Dari definisi strategi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi adalah suatu tindakan yang diambil dari beberapa pilihan, kemudian perusahaan atau organisasi secara terus menerus memutuskan pilihan tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut.

2.3.2 Perencanaan Strategis

Rencana strategis adalah proses menganalisis, merumuskan, dan mengevaluasi strategi yang digunakan manajer untuk mengatasi ancaman eksternal dan memanfaatkan peluang yang ada. Tujuan utama dari renstra adalah agar organisasi dapat secara obyektif melihat kondisi internal dan eksternal sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, perencanaan strategis sangat penting untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan

memiliki produk yang memenuhi kebutuhan konsumen dengan dukungan terbaik dari sumber daya yang ada..

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil, yang harus diselesaikan dalam waktu 1 sampai 5 tahun terkait dengan tanggung jawab dan fungsi perangkat daerah, dan pengembangan lingkungan strategis harus dipertimbangkan. Rencana strategis dapat dilihat sebagai keseluruhan rencana atau peta jalan, yang menjelaskan bagaimana mengimplementasikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan. Instrumen Renstra Daerah disusun sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya untuk mencapai tujuan jangka menengah perangkat daerah, yang sejalan dengan strategi dan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Olsen dan Eadie (dalam Bryson, 2007:5) menyatakan: “Perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu.

Maksud dari definisi tersebut adalah seorang pimpinan puncak perlu menetapkan Langkah-langkah atau strategi apa yang akan diambil untuk melakukan tindakan penting dalam organisasi dengan mengadakan analisis terhadap factor-faktor internal dan eksternalnya terlebih dahulu.

Dalam proses penyusunan strategi tidak hanya memberikan sebuah pemahaman yang realistis tentang jalannya suatu proses serta menerangkan mengapa dan bagaimana sebuah strategi direalisasikan, tetapi juga Menyediakan strategi-

strategi dengan memperkirakan alternatif pilihan yang nantinya akan memberikan hasil yang berbeda dan lebih baik.

Bryson (2007:12.13), perencanaan strategis memiliki beberapa manfaat, yaitu : Berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif.

- a. Memperjelas arah masa depan.
- b. Menciptakan prioritas
- c. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan.
- d. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan.
- e. Menggunakan kekuasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada di bawah kontrol organisasi.
- f. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi.
- g. Memecahkan masalah utama organisasi.
- h. Memperbaiki kinerja organisasi.
- i. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif.
- j. Membangun kerja kelompok dan keahlian.

Selain itu, Bryson (2007: 55) menjelaskan bahwa terdapat delapan langkah dalam perencanaan strategis yang dapat membantu organisasi berpikir secara strategis dan mengambil tindakan. Langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Memulai dan menyetujui proses perencanaan strategis.
- b. Tentukan tugas organisasi.
- c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.
- d. Menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman.
- e. Menilai lingkungan internal: keuntungan dan kerugian.
- f. F. Identifikasi masalah strategis yang dihadapi organisasi.

Langkah pertama adalah memulai dan menyepakati proses perencanaan strategis. Tujuan dari proses perencanaan strategis awal adalah untuk menegosiasikan kesepakatan dengan pengambil keputusan internal dan eksternal utama. Dorongan dan komitmen awal ini sangat penting bagi perencana strategis yang berhasil. Langkah kedua adalah menentukan tugas organisasi. Amanat merupakan pekerjaan yang perlu diselesaikan, lebih menitikberatkan pada fungsi / tanggung jawab dan kewajiban organisasi. Oleh karena itu tujuan langkah kedua adalah untuk memahami dan memperjelas arti dan sifat amanah yang diemban oleh organisasi, baik formal maupun informal.

Langkah ketiga adalah memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Misi memungkinkan Anda untuk memahami tujuan organisasi atau mengapa organisasi melakukan dan apa yang dilakukannya. Langkah keempat adalah menilai lingkungan eksternal untuk menentukan peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Peluang dan ancaman dapat diidentifikasi dengan memantau berbagai kekuatan dan tren politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Langkah kelima adalah mengevaluasi lingkungan internal. Langkah ini dapat dilakukan dengan memantau status sumber daya yang dimiliki (input), strategi yang sedang digunakan (proses), dan kinerja pedal (keluaran).

Langkah keenam adalah menentukan masalah strategis yang dihadapi organisasi. Pernyataan tentang masalah strategis harus mencakup tiga elemen, yaitu metode pengungkapan yang sesingkat mungkin, mencantumkan faktor-faktor yang menyebabkan masalah strategis, dan menentukan konsekuensi dari kegagalan menyelesaikan masalah strategis tersebut. Langkah ketujuh adalah

mengembangkan strategi untuk memecahkan masalah. Strategi desain dapat digunakan untuk mengatasi masalah strategis langsung. Strategi yang efektif harus memenuhi syarat-syarat berikut: layak secara teknis, dapat diterima secara politik, dan strategi tersebut harus berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan. Langkah kedelapan adalah menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan. Pada langkah terakhir dari proses perencanaan strategis ini, organisasi akan menjelaskan bagaimana organisasi berhasil menerapkan strateginya dan menyadari potensinya.

Selain itu, dengan mengadopsi konsep perencanaan strategis yang dikemukakan oleh Bryson, penulis merangkum langkah-langkah dalam perencanaan strategis, antara lain:

1. Identifikasi Visi, Misi, dan Mandat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB
Identifikasi visi, misi, dan mandat diperlukan untuk mengetahui alasan kehadiran suatu organisasi dan tujuan apa yang ingin diwujudkan dengan membentuk organisasi tersebut. Tujuan identifikasi mandat adalah untuk mengenali dan memperjelas tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram. Visi organisasi adalah gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang dan menjadi arah atau pegangan bagi Dinas Koperasi dan UKM dalam mewujudkan cita-cita yang selaras dan berkesinambungan, sedangkan misi organisasi adalah tujuan yang unik yang dapat membedakannya dengan organisasi lain yang sejenis dengan mengidentifikasi cakupan operasinya. Jika mandat merupakan apa yang

boleh dan tidak boleh dilakukan, maka misi adalah mengapa organisasi melakukan apa yang dilakukan.

1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

a. Faktor Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan situasi dan kondisi dalam organisasi yang saling mempengaruhi serta terkait dengan misi, mandat, tugas, dan fungsi organisasi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan analisis terhadap lingkungan internal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, yang merupakan aspek-aspek yang membantu maupun yang merintangi pencapaian misi dan pemenuhan mandat.

b. Faktor Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal adalah lingkungan di luar organisasi yang tidak berada di bawah kendali organisasi tetapi yang mempengaruhi organisasi. Lingkungan eksternal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB sangat luas dan kompleks serta selalu berubah. Baik terencana, terencana, atau tidak, perubahan ini akan terjadi dengan cepat, dan perubahan ini pasti akan terjadi. Agar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB tidak mengalami kemunduran, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB harus mampu beradaptasi dan merespon perubahan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal organisasi dapat menciptakan peluang dan ancaman bagi koperasi dan kantor UKM.

2.4 KONSEP PEMBERDAYAAN

2.4.1 Definisi Pemberdayaan

Secara etimologis, authorization adalah terjemahan dari kata authorization, yang berasal dari kata authorization, dan mengandung dua arti: (i) empowerment (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan kekuasaan kepada pihak lain). (ii) Memberdayakan, mengaktifkan (mencoba memberdayakan). Judistira K Garna (2000: 3) mengemukakan penggunaan istilah “empowerment and empowerment”. Empowerment and empowerment memiliki dua arti dalam bahasa Inggris. Arti pertama adalah ... to empower atau empower; Is ... empowering. Atau aktifkan. Definisi pertama diartikan sebagai pemberian kekuasaan, penyerahan kekuasaan, atau pendelegasian wewenang kepada pihak lain, sedangkan pengertian kedua adalah upaya memberikan kemampuan atau otorisasi.

Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini,

pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Upaya penguatan kekuasaan dapat dilihat dari tiga aspek: Pertama, menciptakan lingkungan yang dapat mengembangkan potensi masyarakat. Kedua, untuk meningkatkan potensi atau sumber daya ekonomi masyarakat, tugas pokoknya adalah meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan, dan akses ke sumber daya seperti permodalan, teknologi, lapangan kerja dan pasar pembangunan ekonomi. Ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi rakyat berarti mencegah dan melindungi masyarakat dari perbedaan ekonomi, serta membangun solidaritas dan kemitraan antara negara maju dan negara terbelakang.

Sementara itu, Totok dan Poerwoko (2013: 14) mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses, yaitu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan / atau mengoptimalkan kelompok yang kurang beruntung secara sosial (termasuk masyarakat miskin). Individu) otorisasi (dalam hal kompetensi) dan / atau keunggulan kompetitif). Sebagai suatu proses, pemberdayaan mengacu pada kemampuan untuk berpartisipasi dalam memperoleh peluang dan / atau akses ke sumber daya dan layanan (dalam arti luas, termasuk individu, kelompok, dan

komunitas) yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan pemahaman ini, otorisasi dapat didefinisikan sebagai proses yang direncanakan untuk memperluas / meningkatkan utilitas objek yang diotorisasi.

Jika didasarkan pada kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil maka pengertian pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperluas suasana usaha serta memajukan dan mengembangkan usaha kecil. Perusahaan dapat tumbuh dan berkembang, menjadi perusahaan yang tangguh dan mandiri. Suasana usaha seperti ini merupakan kondisi yang diupayakan oleh pemerintah dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan di semua aspek kehidupan ekonomi, sehingga usaha kecil dapat memperoleh jaminan seluas-luasnya, kesempatan yang sama dan dukungan usaha yang memungkinkan mereka untuk berkembang menjadi suatu negara. bisnis yang kuat dan mandiri. Sedangkan pembinaan dan pengembangan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan memberikan pembinaan dan penguatan pendampingan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang berdaya dan mandiri.

Menurut konsep Pranaka dan Priyono (1996), konsep pemberdayaan masyarakat dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap partisipasi, dan tahap pembebasan. Pada tahap awal, semua proses pemberdayaan bersumber dari pemerintah, diprakarsai oleh pemerintah, dan menghadapi masyarakat. Pada tahap ini masyarakat masih pasif, melaksanakan rencana pemerintah dan masih mengandalkan pemerintah. Pada tahap partisipasi, proses pemberdayaan berasal

dari pemerintah dan masyarakat, dan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, dan bertujuan untuk mengabdikan kepada masyarakat. Pada tahap ini masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan untuk kemandirian. Kemudian pada fase pembebasan, proses pemberdayaan berasal dari komunitas, komunitas, dan komunitas yang didukung oleh pemerintah. Pada tahap ini masyarakat telah menemukan kekuatannya sendiri, dapat menggunakan kekuatannya sendiri, sehingga dapat mencapai pembaharuan realisasi diri.

2.4.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Biasanya ada empat prinsip untuk keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan, yaitu kesetaraan, partisipasi, kemandirian atau kemandirian dan keberlanjutan. Detailnya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesamaan status antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan rencana pemberdayaan masyarakat (tanpa memandang gender).

Dengan membangun mekanisme untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan keahlian, hubungan dinamis yang dibangun adalah hubungan yang setara. Masing-masing saling mengenal kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadilah proses saling belajar.

2. Prinsip Partisipasi

Rencana pemberdayaan yang dapat menginspirasi kemandirian masyarakat adalah rencana yang melibatkan partisipasi masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Namun untuk mencapai level ini membutuhkan waktu dan proses pembinaan, dan proses partisipasi membutuhkan koordinator yang memiliki komitmen tinggi dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

4. Berkenlanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan

akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

2.5 TEORI EFEKTIFITAS

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Mahmudi (2010: 143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pemungutan.

Steers (dalam Sutomo, 2010:59) mengatakan bahwa yang terbaik dalam memeliti efektivitas adalah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan, yaitu: optimalisasi tujuan-tujuan, perspektif sistem dan tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Cara seperti ini disebut ancangan saja, misalnya hanya dari segi tujuan. Ancangan optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan dikenali bermacam-macam tujuan, meski tampaknya sering saling bertentangan. Kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut seberapa jauh susunan organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sama lain saling berkaitan. Penilaian terhadap efektivitas berupa pernyataan berdasarkan fakta tentang seberapa banyak tujuan program dapat dicapai, seberapa besar komponen-komponen program telah berfungsi dalam pencapaian tujuan. Berbicara tentang efektivitas program maka persoalannya menjadi tumbuh kompleks apalagi diingat bahwa sumber masalah yang hendak dipecahkan tak hanya berasal dari kondisi individu sebagai penyandang masalah, melainkan juga dapat berasal dari level sistem. Program atau usaha dikatakan efektif apabila suatu usaha mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Pengertian yang memadai mengenai tujuan efektivitas ataupun sasaran merupakan langkah pertama dalam pembahasan efektivitas, dimana hal ini sering kali berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai.

2.5.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut metode efektivitas organisasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan yang jelas.
- b. Struktur organisasi,
- c. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat,
- d. Adanya sistem nilai yang dianut.

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan organisasi adalah memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Struktur dapat mempengaruhi efektivitas dikarenakan struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang kaya akan fungsi dan sederhana. Selanjutnya, tanpa ada dukungan dan partisipasi serta sistem nilai yang ada maka akan sulit untuk mewujudkan organisasi yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas. Richard M Steers (1985:209) menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu :

- a. Karakteristik Organisasi
- b. Karakteristik Pekerja
- c. Prestasi Kerja
- d. Karakteristik Lingkungan
- e. Kebiasaan dan Praktek Manajeme

2.5.2 Pengukuran Efektivitas

Efektifitas adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya indikator yang telah ditetapkan yaitu tepat jumlah, waktu, sasaran, harga, administrasi dan kualitas. Jika kegiatan mendekati indikator berarmakin tinggi efektifitasnya. Untuk peningkatan efektifitas ditingkat RTS pemerintah menerapkan sistem manajemen yang baik, manajemen waktu dan pengelolaan. Adapun kriteria dalam mnegukur Efektivitas suatu program ddpad dilihat dengan menggunakan Variabel-variabel menurut Budiani (2007:53) mengemukakan empat kriteria, yaitu sebagai berikut :

1. Ketepatan Sasaran program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program

2.6 PANDEMI COVID-19 TERHADAP UMKM

UMKM merupakan industri yang paling terdampak wabah Virus Corona (Covid-19). Menurut informasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, setidaknya 949 koperasi peserta dan laporan UMKM telah terdampak wabah virus corona.

Selain itu, terdapat puluhan juta unit usaha di industri mikro, jika tidak ditangani tentu akan menjadi masalah besar. Pelaku usaha UMKM akan mengeluhkan beberapa hal akibat virus corona, seperti Virus Corona untuk Usaha

Kecil dan Menengah UMKM): Selain itu, terdapat puluhan juta unit usaha di industri mikro, jika tidak ditangani tentu akan menjadi masalah besar. Pelaku usaha UMKM akan mengeluhkan beberapa hal akibat virus corona, seperti Virus Corona untuk Usaha Kecil dan Menengah UMKM) :

1. Penurunan penjualan
2. Kesulitan mendapatkan bahan baku
3. Distribusi yang terganggu
4. Mengalami kesulitan keuangan
5. Penundaan produksi

Berdasarkan keluhan diatas dapat disimpulkan bahwa wabah Covid-19 memang sangat berdampak terhadap bisnis UMKM para pemilik UMKM pun harus siap sedia dalam mengantisipasinya. Adapun beberapa cara mengantisipasinya ialah :

1. Saat terjadi pandemi, pertahankan volume penjualan dengan meningkatkan volume penjualan online masing-masing produk UMKM dan menawarkan harga terbaik atau hanya menawarkan diskon besar agar masyarakat dapat menyediakan produk atau jasa yang akan dijual.
2. UMKM dapat mencari bahan produksi dari bahan baku lokal, meskipun kualitasnya berbeda.
3. UMKM dapat mengetahui stimulus apa saja yang dikeluarkan selama pandemi korona untuk membantu perusahaan terus berkembang, termasuk mendapatkan bantuan finansial.

4. Apabila pendistribusian ke konsumen terlambat maka peserta UMKM dapat melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen agar ekspektasi kedatangan barang sesuai dengan harapannya.

2.6.1 Upaya Pengembangan UMKM

Mengembangkan UMKM dengan fokus pada peningkatan kualitas pelaku usaha saat terjadi pandemi.

1. Membangun komunitas digital peserta UMKM

Saat ini, internet dapat dengan mudah digunakan sebagai media komunitas berbasis teknologi. Obrolan seperti whatsapp line telegram dapat digunakan sebagai sarana informasi.

2. Menyediakan program radio dan televisi tentang UMKM

Bekerja sama dengan lembaga penyiaran TV lokal, nasional dan swasta untuk menyiarkan program UMKM.

3. Pengembangan integritas UKM

Mendorong tata kelola yang baik dan penggunaan teknologi untuk mengelola usahanya guna membina usaha kecil menengah yang belum memiliki tata kelola dan penguasaan teknis yang baik. Bagi UMKM yang menggandeng Pembina, pemerintah dapat memberikan reward untuk mendorong peningkatan kualitas pelaku usaha dari UMKM hingga UMKM.

4. Mendorong UKM untuk beralih ke digital

Untuk lebih memperkuat pelatihan berbasis teknologi bagi para pelaku UKM teknologi, agar penggunaan platform digital, pasar dan software aplikasi oleh peserta UKM terus meningkat.

5. Mengizinkan produk UKM berpartisipasi dalam kegiatan skala lokal, nasional dan internasional.

Pemerintah dapat mempromosikan atau bahkan mewajibkan penggunaan produk UKM dalam berbagai kegiatan, seminar, lomba, pelatihan, dll, terutama produk yang menjadi program dan kegiatan pemerintah.

6. Mengoptimalkan media sosial dan pekerja digital untuk mempromosikan UKM.

Seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet, media sosial terus menjadi media terpopuler di dunia maya. Bahkan jika persentase penggunaan Internet untuk tujuan media sosial di negara tersebut mencapai 87,13%, namun tetap menempati urutan kedua setelah posisi chatting.

2.7 LANDASAN HUKUM

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan berdasarkan dari TUPOKSI masing-masing dan PP RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Kecil, dan Menengah. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan dasar hukum pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang

menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdiri atas 11 bab dan 44 pasal yang membahas antara lain tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sanksi administratif dan ketentuan pidana, ketentuan penutup.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 43 tahun 2020 tentang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) melalui Bela Dan Beli Produk Lokal menyatakan bahwa :

- a. bahwa untuk menumbuhkan kecintaan terhadap produk lokal daerah yang diwujudkan dengan cara memproduksi, memasarkan, dan membeli serta menggunakan produk lokal daerah;
- b. bahwa Usaha Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum memiliki kapasitas berproduksi dan daya saing pasar yang memadai sehingga perlu dilindungi mulai dari bahan baku, produksi sampai dengan pemasaran serta hak kekayaan intelektualnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Bela dan Beli Produk Lokal.

2.8 KERANGKA BERFIKIR

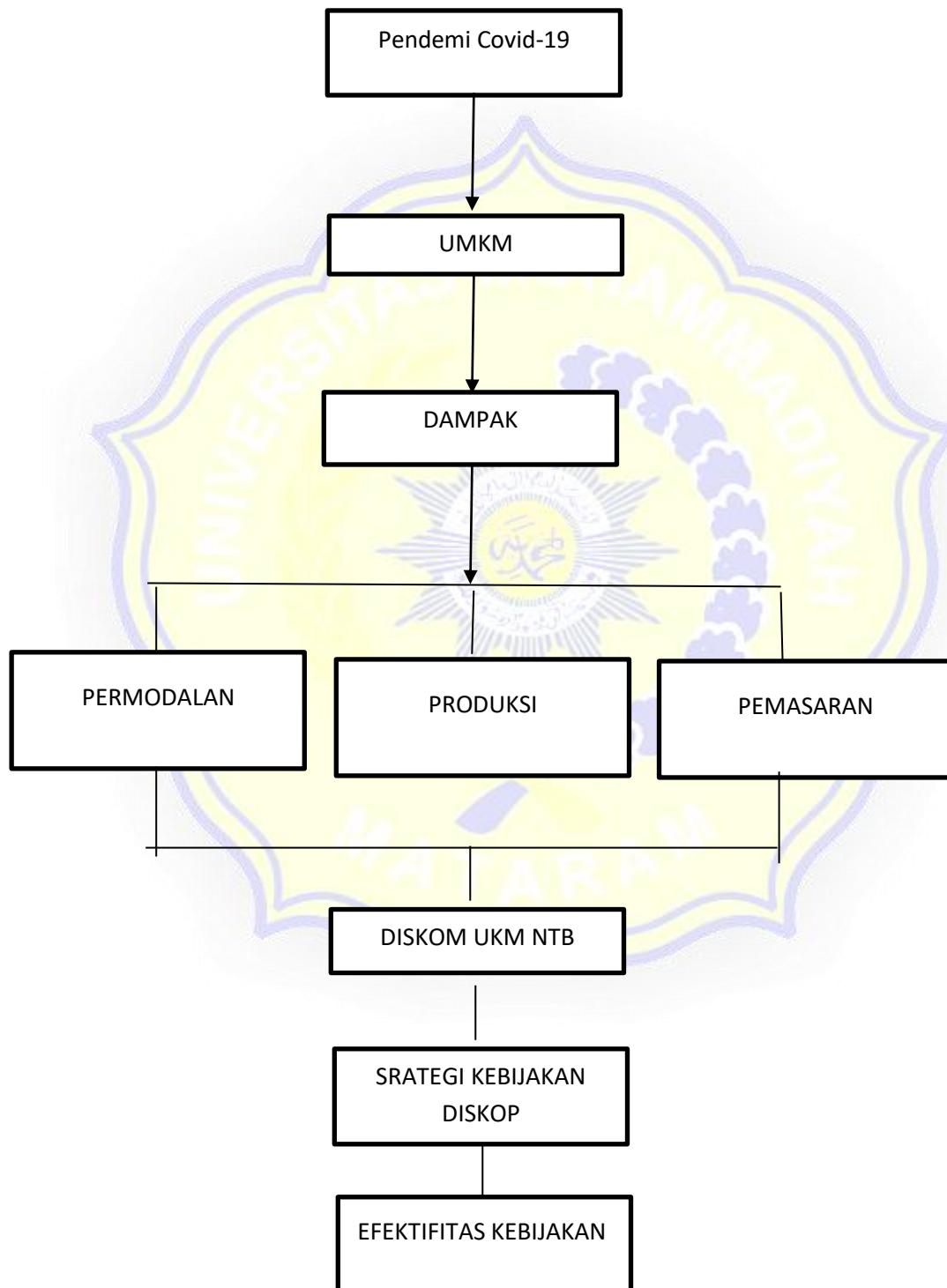
Pembinaan dan pengembangan Serta pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah merupakan langkah yang Strategis untuk dikembangkan demi memperkokoh struktur perekonomian nasional dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Mengingat pengaruh Global pada Virus Corona yang saat ini masih menjadi masalah terutama di setor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat berdampak pada bidang Permodalan,Produksi Pemasaran. pemerintah Nusa Tenggara Barat dan Dinas Koperasi dan UKM telah merancang beberapa Strategis untuk memberdayakan UMKM yang terdampak Pandemi covid-19 dengan efektif Adapun beberapa strategis yang di terapkan oleh Dinas koperasi UKM Provinsi NTB

Saat melaksanakan rencana kerja yang telah disiapkan, dipastikan terdapat beberapa faktor pendukung dan kendala yang menghambat keberhasilan suatu rencana. Faktor pendukung meliputi segala sesuatu dalam bentuk material dan non material, yang secara efektif dapat mendukung rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Koperasi dan UKM Provinsi NTB, sehingga pada akhirnya memungkinkan sektor UKM yang didukung dapat beroperasi secara mandiri. Kerangka kerja ini dapat diperjelas dalam arsitektur berikut

Gambar 2.1
Kerangka berfikir

Gambar 0.1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif dan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kemudian, metode penelitian deskriptif adalah metode yang meneliti keadaan terkini dari sekelompok orang, suatu objek, sekumpulan kondisi, sekumpulan sistem pemikiran, atau serangkaian peristiwa. Tujuan dari studi deskriptif ini adalah untuk secara akurat mendeskripsikan, mendeskripsikan atau melukiskan fakta, karakteristik dan sistem relasional dari fenomena yang diteliti (Nazir (1988: 63)).

Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif adalah interpretasi fakta yang benar. Penelitian tersebut bertujuan untuk menyelidiki aktivitas dan pekerjaan manusia secara detail. Hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk kebutuhan masa depan (job analysis).

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

1). Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data (Sugiyono: 2018: 104). Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observer dan wawancara langsung dengan informan dalam hal ini partisipan adalah partisipan dalam gerakan sosial. Selain itu, Susanti (2020: 33) mengemukakan bahwa data mentah merupakan bahan pengikat, seperti hasil wawancara yang lebih memudahkan untuk mendeskripsikan hasil penelitian.

2). Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2015). Data pembantu dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari catatan, pengambilan data atau dokumen dari objek yang akan diteliti.

Menurut Susanti (2020: 34), data sekunder adalah data yang telah disediakan berupa kepustakaan dan dokumen lain yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, karena penulis menyelesaikan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berkaitan erat dengan masalah. Informasi tentang gerakan sosial diperoleh dalam arsip seperti buku, jurnal, internet, dan sumber terkait penelitian lainnya.

Dalam penyusunan makalah untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diperoleh data dari berbagai sumber, yang nantinya akan disusun dan diolah untuk menyempurnakan analisis. Menurut Moleong (2001: 112), merekam sumber data melalui wawancara atau observasi merupakan hasil yang komprehensif dari menonton, menyimak, dan mengajukan pertanyaan. Padahal sumber data yang tercakup dalam penelitian ini antara lain:

3.3.2. Sumber Data

a. Informan

Penyelenggara penelitian adalah obyek penelitian yang dapat memberikan informasi tentang fenomena / masalah dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga kategori yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pembantu. Penyedia informasi kunci adalah penyedia informasi yang memiliki informasi lengkap atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Penyedia informasi kunci tidak hanya memahami situasi / fenomena masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memahami informasi tentang penyedia informasi utama. Pemilihan informan kunci tergantung pada unit analisis yang akan dipelajari. Misalnya pada unit organisasi, informan kunci adalah pimpinan organisasi (Ade Heryana, S.ST, M.KM. (2015: 4).

Dalam penelitian ini whistleblower muncul dalam bentuk whistleblower yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses kegiatan pengembangan UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Informannya adalah:

- 1) kepala Bidang UKM Dinas Koperai dan UKM Prov NTB
- 2) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Kecil Menengah.
- 3) Kepala Bidang Program Dinas Koprasi UKM Provinsi NTB.
- 4) Pelaku UKM yang di Berdayakan Dinas Koperasi dan UKM Prov NTB.

b. Wawancara dan Dokumentasi

Menurut Dedy Mulyana (2010: 180), wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan orang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain berdasarkan tujuan tertentu melalui tanya jawab. Wawancara adalah pengumpulan data secara tatap muka, teknologi . Tatap muka (face to face) dan ajukan pertanyaan dan jawaban langsung antara peneliti dan narasumber. Dengan perkembangan teknologi, teknologi wawancara dapat dilakukan melalui media tertentu seperti telepon, email, WhatsApp, Skype. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran orang lain yaitu hal-hal yang tidak dapat dipahami melalui observasi, serta untuk menentukan dan menelaah informasi yang diperoleh.

Fakta dan data dalam jumlah besar disimpan di bahan dalam bentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia berupa catatan, laporan, buku, surat kabar, agenda, artefak, foto, dll. Dalam penelitian kualitatif, literatur melengkapi

penggunaan metode wawancara dan observasi. Beberapa dokumen yang dapat digunakan untuk melengkapi data penelitian ini antara lain:

- 1) Rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM RI
- 2) Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Tahun 2019-2023
- 3) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- 4) Draf SK Gubernur NTB tahun 2020 tentang Bantuan bagi pelaku UMKM dimas Pandemi Covid-19.

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui observasi, dengan catatan tentang keadaan atau tingkah laku objek yang dituju. (Nana Sudjana, 1989: 84) Observasi adalah observasi sistematis dan pencatatan gejala yang dipelajari. Teknologi observasi adalah observasi dan pencatatan sistematis dari fenomena yang diteliti. Secara garis besar, observasi sebenarnya tidak terbatas pada observasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, 1995: 46.8).

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Pemilihan lokasi tersebut karena penulis menemukan masih banyaknya usaha kecil dan menengah di Provinsi NTB, dan potensi pendapatannya juga besar. Ini dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini tentunya tidak dapat diintervensi oleh koperasi dan lembaga pelayanan UKM melalui strategi yang

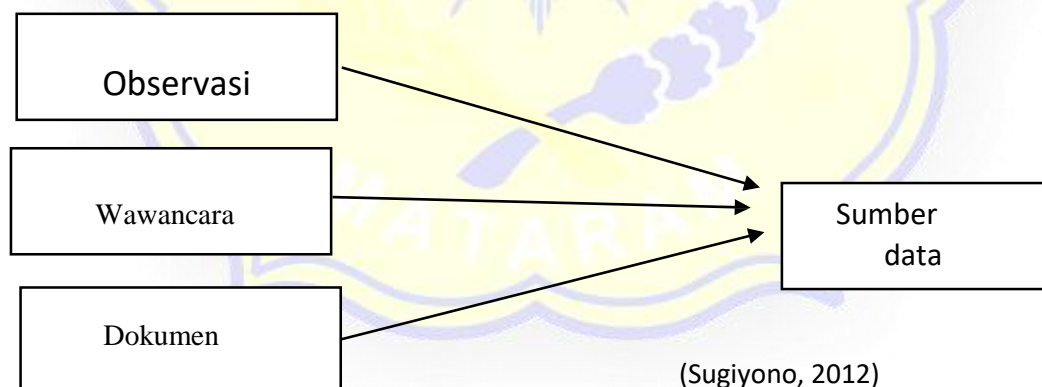
telah ditetapkan untuk menghadapi perkembangan sektor UMKM ketika peneliti langsung masuk ke daerah atau lokasi dimana peserta UKM binaan UKM berada

3.4 Validitas Data

Dengan menggunakan validitas data, Anda dapat menentukan apakah data yang dikumpulkan valid dan tetap mengecek data. Data skewness merupakan rangkaian bentuk tingkat ketelitian variabel penelitian yang menghubungkan proses penelitian objek penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti (Sugiyono, 2012). Validitas data akan membuktikan apakah data yang diperoleh sesuai dengan data lapangan. Dalam hal ini validitas dilakukan melalui triangulasi data, yaitu upaya untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut.

Gambar 3.1

TEKNIK TRIANGULASI DATA



3.5 Teknik Analisa Data

Penggunaan model Miles dan Hubberman untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini disebut analisis model interaktif. Menurut H. Besutopo, model terdiri dari tiga komponen utama yaitu: reduksi data, penyajian data dan grafik kesimpulan data (Sugiyono 2010: 135). Lebih jelasnya perlu diuraikan tiga komponen kegiatan tersebut, yaitu:

1) Data Reduction

Mengurangi data berarti meringkas, memilih dan memilih konten utama, fokus pada konten penting, mencari tema dan pola. Oleh karena itu, data yang direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data lebih lanjut bila diperlukan. (Sugiyono 2010: 135).

2) Data Display

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data tersebut. Dengan menampilkan data, data dapat diatur dan diatur dalam pola relasional agar mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, data dapat direpresentasikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, dan hubungan antar kategori. Dalam hal ini, Miles dan Huberman (1984) mengemukakan: Yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.

3) Conclusion Drawing

Menurut Miles dan Huberman, ini adalah kesimpulan dan pembuktian. Kesimpulan awal masih bersifat sementara. Jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data tahap selanjutnya, maka kesimpulan tersebut akan diubah, namun jika kesimpulan yang diajukan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika penelitian kembali ke Adegan itu, Ini akan sementara. Data, kemudian kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang kredibel.

Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dari awal, tetapi mungkin juga tidak, karena sebagian orang berpendapat bahwa pertanyaan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan dikembangkan di bidang penelitian. . Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penemuan dapat berupa uraian, atau uraian benda yang sebelumnya redup atau gelap sehingga menjadi jelas setelah diinspeksi, dan dapat berupa kausalitas atau interaksi. (Sugiyono 2010: 141-142).